



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 174 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKATSA	ASISTEN I	SEKDA
			

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 7);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan, yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.154.145.653.806,80
b. Pendapatan Transfer	Rp 3.506.829.941.604,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 4.137.772.450,00

Jumlah Pendapatan Rp 5.665.113.367.860,80

2. Belanja, yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 1.181.290.376.492,00
2) Belanja Hibah	Rp 1.125.067.745.185,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp 712.500.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp 925.787.991.195,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 19.016.160.800,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp 208.111.031.257,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 3.459.985.804.929,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 219.123.464.157,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.440.989.141.888,35
3) Belanja Modal	Rp 759.257.928.664,00

Jumlah Belanja Langsung Rp 2.419.370.534.709,35

Jumlah Belanja Rp 5.879.356.339.638,35

Surplus/(Defisit) Rp (214.242.971.777,55)

c. Pembiayaan, yang terdiri dari:

1) Penerimaan	Rp 577.262.139.696,17
2) Pengeluaran	Rp 50.000.000.000,00

3. Jumlah Pembiayaan Netto Rp 527.262.139.696,17

4. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Rp 313.019.167.918,62

KARO HUKUMI	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

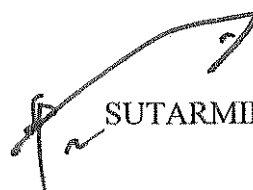
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2021

W. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *Uce*


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, *U*


SUKALIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 174



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	5.799.686.674.152,69	5.665.113.367.860,80	(134.573.306.291,89)	97,68
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.251.717.389.433,69	2.154.145.653.806,80	(97.571.735.626,89)	95,67
3	Pendapatan Pajak Daerah	1.912.719.052.792,30	1.808.971.365.632,98	(103.747.687.159,32)	94,58
4	Pendapatan Retribusi Daerah	36.177.618.000,00	37.138.177.049,00	960.559.049,00	102,66
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.751.046.186,00	92.250.362.470,00	(500.683.716,00)	99,46
6	Lain-lain PAD yang sah	210.069.672.455,39	215.785.748.654,82	5.716.076.199,43	102,72
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.251.717.389.433,69	2.154.145.653.806,80	(97.571.735.626,89)	95,67
8	PENDAPATAN TRANSFER	3.542.541.431.719,00	3.506.829.941.604,00	(35.711.490.115,00)	98,99
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	3.542.541.431.719,00	3.506.829.941.604,00	(35.711.490.115,00)	98,99
10	Dana Bagi Hasil Pajak	125.625.943.000,00	119.704.592.671,00	(5.921.350.329,00)	95,29
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	46.498.400.000,00	57.565.303.885,00	11.066.903.885,00	123,8
12	Dana Alokasi Umum	1.568.574.205.000,00	1.563.770.887.000,00	(4.803.318.000,00)	99,69
13	Dana Alokasi Khusus	1.801.842.883.719,00	1.765.789.158.048,00	(36.053.725.671,00)	98,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	3.542.541.431.719,00	3.506.829.941.604,00	(35.711.490.115,00)	98,99
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	-	-	-	0,00
16	Dana Penyesuaian	-	-	-	0,00
17	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	0,00
18	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	0,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-	0,00
20	Tetal Pendapatan Transfer	3.542.541.431.719,00	3.506.829.941.604,00	(35.711.490.115,00)	98,99
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.427.853.000,00	4.137.772.450,00	(1.290.080.550,00)	76,23
22	Pendapatan Hibah	5.427.853.000,00	4.137.772.450,00	(1.290.080.550,00)	76,23
23	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	0,00
24	Pendapatan Lainnya	-	-	-	0,00
25	Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah	5.427.853.000,00	4.137.772.450,00	(1.290.080.550,00)	76,23
26	JUMLAH PENDAPATAN	5.799.686.674.152,69	5.665.113.367.860,80	(134.573.306.291,89)	97,68
27	BELANJA	6.326.948.813.848,86	5.879.356.339.638,35	(447.592.474.210,51)	92,93
28	BELANJA OPERASI	4.237.394.965.078,11	3.967.183.227.722,35	(270.211.737.355,76)	93,62
29	Belanja Pegawai	1.585.045.218.766,38	1.400.413.840.649,00	(184.631.378.117,38)	88,35
30	Belanja Barang	1.500.965.824.311,73	1.440.989.141.888,35	(59.976.682.423,38)	96,00
31	Bunga	-	-	-	0,00
32	Subsidi	-	-	-	0,00
33	Hibah	1.150.296.422.000,00	1.125.067.745.185,00	(25.228.676.815,00)	97,81
34	Bantuan Sosial	1.087.500.000,00	712.500.000,00	(375.000.000,00)	65,52
35	Jumlah Belanja Operasi	4.237.394.965.078,11	3.967.183.227.722,35	(270.211.737.355,76)	93,62
36	BELANJA MODAL	841.073.294.939,12	759.257.928.664,00	(81.815.366.275,12)	90,27
37	Belanja Tanah	14.562.141.504,00	2.764.248.864,00	(11.797.892.640,00)	18,98
38	Belanja Peralatan dan Mesin	329.348.716.657,36	308.290.811.314,00	(21.057.905.343,36)	93,61
39	Belanja Gedung dan Bangunan	335.717.453.923,76	299.731.449.218,00	(35.986.004.705,76)	89,28
40	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	152.821.004.854,00	142.385.503.594,00	(10.435.501.260,00)	93,17
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	829.217.000,00	813.645.425,00	(15.571.575,00)	98,12
42	Belanja Aset Lainnya	7.794.761.000,00	5.272.270.249,00	(2.522.490.751,00)	67,64
43	Jumlah Belanja Modal	841.073.294.939,12	759.257.928.664,00	(81.815.366.275,12)	90,27

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMR AKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>~</i>	<i>h</i>	<i>lke</i>



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	5.799.686.674.152,69	5.665.113.367.860,80	(134.573.306.291,89)	97,68
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.251.717.389.433,69	2.154.145.653.806,80	(97.571.735.626,89)	95,67
3	Pendapatan Pajak Daerah	1.912.719.052.792,30	1.808.971.365.632,98	(103.747.687.159,32)	94,58
4	Pendapatan Retribusi Daerah	36.177.618.000,00	37.138.177.049,00	960.559.049,00	102,66
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.751.046.186,00	92.250.362.470,00	(500.683.716,00)	99,46
6	Lain-lain PAD yang sah	210.069.672.455,39	215.785.748.654,82	5.716.076.199,43	102,72
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.251.717.389.433,69	2.154.145.653.806,80	(97.571.735.626,89)	95,67
8	PENDAPATAN TRANSFER	3.542.541.431.719,00	3.506.829.941.604,00	(35.711.490.115,00)	98,99
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	3.542.541.431.719,00	3.506.829.941.604,00	(35.711.490.115,00)	98,99
10	Dana Bagi Hasil Pajak	125.625.943.000,00	119.704.592.671,00	(5.921.350.329,00)	95,29
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	46.498.400.000,00	57.565.303.885,00	11.066.903.885,00	123,8
12	Dana Alokasi Umum	1.568.574.205.000,00	1.563.770.887.000,00	(4.803.318.000,00)	99,69
13	Dana Alokasi Khusus	1.801.842.883.719,00	1.765.789.158.048,00	(36.053.725.671,00)	98,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	3.542.541.431.719,00	3.506.829.941.604,00	(35.711.490.115,00)	98,99
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	-	-	-	0,00
16	Dana Penyesuaian	-	-	-	0,00
17	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	0,00
18	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	0,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-	0,00
20	Total Pendapatan Transfer	3.542.541.431.719,00	3.506.829.941.604,00	(35.711.490.115,00)	98,99
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.427.853.000,00	4.137.772.450,00	(1.290.080.550,00)	76,23
22	Pendapatan Hibah	5.427.853.000,00	4.137.772.450,00	(1.290.080.550,00)	76,23
23	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	0,00
24	Pendapatan Lainnya	-	-	-	0,00
25	Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah	5.427.853.000,00	4.137.772.450,00	(1.290.080.550,00)	76,23
26	JUMLAH PENDAPATAN	5.799.686.674.152,69	5.665.113.367.860,80	(134.573.306.291,89)	97,68
27	BELANJA	6.326.948.813.848,86	5.879.356.339.638,35	(447.592.474.210,51)	92,93
28	BELANJA OPERASI	4.237.394.965.078,11	3.967.183.227.722,35	(270.211.737.355,76)	93,62
29	Belanja Pegawai	1.585.045.218.766,38	1.400.413.840.649,00	(184.631.378.117,38)	88,35
30	Belanja Barang	1.500.965.824.311,73	1.440.989.141.888,35	(59.976.682.423,38)	96,00
31	Bunga	-	-	-	0,00
32	Subsidi	-	-	-	0,00
33	Hibah	1.150.296.422.000,00	1.125.067.745.185,00	(25.228.676.815,00)	97,81
34	Bantuan Sosial	1.087.500.000,00	712.500.000,00	(375.000.000,00)	65,52
35	Jumlah Belanja Operasi	4.237.394.965.078,11	3.967.183.227.722,35	(270.211.737.355,76)	93,62
36	BELANJA MODAL	841.073.294.939,12	759.257.928.664,00	(81.815.366.275,12)	90,27
37	Belanja Tanah	14.562.141.504,00	2.764.248.864,00	(11.797.892.640,00)	18,98
38	Belanja Peralatan dan Mesin	329.348.716.657,36	308.290.811.314,00	(21.057.905.343,36)	93,61
39	Belanja Gedung dan Bangunan	335.717.453.923,76	299.731.449.218,00	(35.986.004.705,76)	89,28
40	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	152.821.004.854,00	142.385.503.594,00	(10.435.501.260,00)	93,17
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	829.217.000,00	813.645.425,00	(15.571.575,00)	98,12
42	Belanja Aset Lainnya	7.794.761.000,00	5.272.270.249,00	(2.522.490.751,00)	67,64
43	Jumlah Belanja Modal	841.073.294.939,12	759.257.928.664,00	(81.815.366.275,12)	90,27

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
44	BELANJA TAK TERDUGA	303.609.318.598,17	208.111.031.257,00	(95.498.287.341,17)	68,55
45	Belanja Tak Terduga	303.609.318.598,17	208.111.031.257,00	(95.498.287.341,17)	68,55
46	Jumlah Belanja Tak Terduga	303.609.318.598,17	208.111.031.257,00	(95.498.287.341,17)	68,55
47	JUMLAH BELANJA	5.382.077.578.615,40	4.934.552.187.643,35	(447.525.390.972,05)	91,68
48	TRANSFER	944.871.235.233,46	944.804.151.995,00	(67.083.238,46)	99,99
49	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	925.855.074.433,46	925.787.991.195,00	(67.083.238,46)	99,99
50	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	925.855.074.433,46	925.787.991.195,00	(67.083.238,46)	99,99
51	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00
52	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00
53	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	925.855.074.433,46	925.787.991.195,00	(67.083.238,46)	99,99
54	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	19.016.160.800,00	19.016.160.800,00	-	100,00
55	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	19.016.160.800,00	19.016.160.800,00	-	100,00
56	Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	0,00
57	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	19.016.160.800,00	19.016.160.800,00	-	100,00
58	JUMLAH TRANSFER	944.871.235.233,46	944.804.151.995,00	(67.083.238,46)	99,99
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	6.326.948.813.848,86	5.879.356.339.638,35	(447.592.474.210,51)	92,93
60	SURPLUS/DEFISIT	(527.262.139.696,17)	(214.242.971.777,55)	313.019.167.918,62	40,63
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	577.262.139.696,17	577.262.139.696,17	-	100,00
63	Penggunaan SILPA	577.262.139.696,17	577.262.139.696,17	-	100,00
64	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	0,00
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	0,00
72	JUMLAH PENERIMAAN	577.262.139.696,17	577.262.139.696,17	-	100,00
73	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	100,00
74	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	0,00
81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	100,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-	-	0,00
85	JUMLAH PENGELUARAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	100,00
86	PEMBIAYAAN NETTO	527.262.139.696,17	527.262.139.696,17	-	100,00
87	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	313.019.167.918,62	313.019.167.918,62	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	5.799.686.674.152,69	5.665.113.367.860,80	(134.573.306.291,89)	97,68
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.251.717.389.433,69	2.154.145.653.806,80	(97.571.735.626,89)	95,67
4.01.01	Pajak Daerah	1.912.719.052.792,30	1.808.971.365.632,98	(103.747.687.159,32)	94,58
4.01.02	Retribusi Daerah	36.177.618.000,00	37.138.177.049,00	960.559.049,00	102,66
4.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.751.046.186,00	92.250.362.470,00	(500.683.716,00)	99,46
4.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.069.672.455,39	215.785.748.654,82	5.716.076.199,43	102,72
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.542.541.431.719,00	3.506.829.941.604,00	(35.711.490.115,00)	98,99
4.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	3.542.541.431.719,00	3.506.829.941.604,00	(35.711.490.115,00)	98,99
4.02.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak	172.124.343.000,00	177.269.896.556,00	5.145.553.556,00	102,99
4.02.01.03	Dana Alokasi Umum	1.568.574.205.000,00	1.563.770.887.000,00	(4.803.318.000,00)	99,69
4.02.01.04	Dana Alokasi Khusus	1.801.842.883.719,00	1.765.789.158.048,00	(36.053.725.671,00)	98,00
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.427.853.000,00	4.137.772.450,00	(1.290.080.550,00)	76,23
4.03.01	Pendapatan Hibah	5.427.853.000,00	4.137.772.450,00	(1.290.080.550,00)	76,23
4.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.799.686.674.152,69	5.665.113.367.860,80	(134.573.306.291,89)	97,68
5	BELANJA DAERAH	6.326.948.813.848,86	5.879.356.339.638,35	(447.592.474.210,51)	92,93
5.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.721.345.341.040,41	3.459.985.804.929,00	(261.359.536.111,41)	92,98
5.01.01	Belanja Pegawai	1.321.480.865.208,78	1.181.290.376.492,00	(140.190.488.716,78)	89,39
5.01.04	Belanja Hibah	1.150.296.422.000,00	1.125.067.745.185,00	(25.228.676.815,00)	97,81
5.01.05	Bantuan Bantuan Sosial	1.087.500.000,00	712.500.000,00	(375.000.000,00)	65,52
5.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	925.855.074.433,46	925.787.991.195,00	(67.083.238,46)	99,99
5.01.07	Belanja Bantuan Keuangan	19.016.160.800,00	19.016.160.800,00	0,00	100,00
5.01.08	Belanja Tidak Terduga	303.609.318.598,17	208.111.031.257,00	(95.498.287.341,17)	68,55
5.02	BELANJA LANGSUNG	2.605.603.472.808,45	2.419.370.534.709,35	(186.232.938.099,10)	92,85
5.02.01	Belanja Pegawai	263.564.353.557,60	219.123.464.157,00	(44.440.889.400,60)	83,14
5.02.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.965.824.311,73	1.440.989.141.888,35	(59.976.682.423,38)	96,00
5.02.03	Belanja Modal	841.073.294.939,12	759.257.928.664,00	(81.815.366.275,12)	90,27
	JUMLAH BELANJA	6.326.948.813.848,86	5.879.356.339.638,35	(447.592.474.210,51)	92,93
	SURPLUS/(DEFISIT)	(527.262.139.696,17)	(214.242.971.777,55)	313.019.167.918,62	40,63
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	577.262.139.696,17	577.262.139.696,17	0,00	100,00
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	577.262.139.696,17	577.262.139.696,17	0,00	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	577.262.139.696,17	577.262.139.696,17	0,00	100,00
6.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	100,00
6.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	527.262.139.696,17	527.262.139.696,17	0,00	100,00
3:03	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	313.019.167.918,62	313.019.167.918,62	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI